

DAFTAR PUSTAKA

Alvian Dwiangga Wijaya and Teddy Prima Anggriawan, (2022)“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone,” *Inicio Legis* 3, no. 1

Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Holt, Rinehart and Winston : New York.

Assiddiqie. 2005, J, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press,).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005),

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Conny R. Semiawan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo,

Edi Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Erlina Maria Christin Sinaga2020, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2.

Fatmawati.2015. *Fikih Siyasa*. (Makassar: Pustaka Almada,).

Fatur, *Pencatutan Nama Anggota Parpol, Begini Penjelasan Praktisi Hukum*, Dialeksis (Banda Aceh, 2 Oktober 2022),

<https://dialeksis.com/aceh/pencatutan-nama-anggota-parpol-begini-penjelasan-praktisi-hukum/>,

Fitri Yani, Ibnu Madjah, and Azan Nurohim, (2021).“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak,” *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 2

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan pertama. Semarang

Hadi, Sumasno.2016, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, Jurnal: Universitas Lambung Mangkurat, jilid 22, Nomor 1.

Hayya, Akiya Qidam.2023.*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Untuk Pendaftaran Partai Politik*. Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009)

Intan Mulyana R, Mustika Ayu S, *Bawaslu Tulungagung Kawal Aduan Pencatutan NIK Keanggotaan Partai Politik*. BAWASLU Kabupaten Tulungagung. 17 September 2022. <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/bawaslu-tulungagung-kawal-aduan-pencatutan-nik-keanggotaan-partai-politik/>.

Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, *Stanford Law Review* Vol.50 Issue 4, Standford.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (PT Raja Grafindo Persada : 2013)

Kiyansyah. 2017. Jakarta. *Pemilu Dan Demokrasi Terkonsolidasi*.
Epicentrum Mahadaya Komunika, .

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu004.pdf

Kristina Agustiani Siantuari, (2015) “Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party),”
Legislasi Indonesia 12, no. 1

Kuswanto, *Konstitusional Penyederhanaan Partai Politik* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 67.

M Irfan Islamy.2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*.
Jakarta : Bumi Aksa.

Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Nganjuk: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5.

Mahardika, Amad Gelora. 2020.*Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 18 no 2.

Martin Luther Manao, ‘Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Parpol.’, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 16.No 1 (2022)..

Martin Luther Manao, Asmat Purba. *Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat*. TEDC Vol. 16 No. 1,

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta; BPEE UII Yogyakarta, 2001),

Mhajir, Noeng Metodologi Penelitian Kualitatif,(Yogyakarta: Rake Sarasin,1996)

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)

Nuryanti Mustari. 2015.*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. (ed pertama : Leutika Nouvalitera).

Radian Syam. 2020. *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka)

Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics”, No. 58, Oktober, 1999,

Redaksi-Politik, *Catut 128 NIK Warga, Parpol Minta Maaf*, Wahana News.co, 08 Oktober 2022, <https://wahananews.co/polhukam/catut-128-nik-warga-parpol-minta-maaf-UocNxktf1g/0>

Riant, Nugroho. 2009.*Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sasongko, Wahyu 2007.*Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung : Universitas lampung,

Satjipto Rahardjo , 2000 *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Sayyid Muhammad Zein Alydrus, (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik,”
Jurnal Lex Suprema 02

Soraja, Alga. *Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM*. 2021. Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia.

Sugiono, 2014 *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta)

Sugiono, *Metode Penelitian penelian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2012)

Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*.

Suharsimi Arikunto,2016 *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitia Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta).

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada).

Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Veri Junaidi dan Muhammad Ihsan Maulana. 2020. *Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Volume 2 Nomor 2 November 2020, Tanjungpinang.

Wabil Fadli Sultan dkk. 2022. “*Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024*”. Palita: Journal of Social Relegion Research 7, no. 2.

Wabil Fadli Sultan, Sukri, Ariana Yunus. 2022. *Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024*. Journal of Social Religion Research., Vol.7, No.2

Yuli Asmara Triputra, (2015) “*Perlindungan Hukum HAM Di Negara Hukum Pancasila,*” Jurnal Pusham Unimed VI, no. 01

Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi